

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua. CV Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Drs. H. Inu Kencana Syafii. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Koentjoro Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia ,Bogor Selatan, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2017.
- Redi Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Peraturan Perundang-Undangan, 2008.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers, 2016.
- SF Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, 1997.
- Sirajuddin et all. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Yanto Nur, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Wasisiono Sadu, *Kapita Selekta, Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Bandung, 2002

B. Karya Ilmiah

- Diyan Isnaeni, 2018. *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam*

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Yurispuden, Vol.1. Sukamto, Bahder, 2019, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Vol.3.

Nazaruddin Lathif, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*.

Lilis, Suwari. *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Unifikasi, Juli, 2017, hlm. 74

Petriella, Yanita., *Adu Cepat antara RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba, Ini Kata Ahli Tambang*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200225/44/1205770/adu-cepat-antara-ruu-cipta-kerja-dan-ruu-minerba-ini-kata-ahli-ambang> diakses pada 8 Oktober 2021

C. Peraturan Perundang–Undangan

_____.*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

_____.*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014*.

_____.*UU Nomor 23 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.

_____.*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009*

_____.*Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Bidang Energi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*

_____.*LNRI Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6525*.

D. Internet

<https://pelayananpublik.id/2019/09/07/urgensi-pengertian-hingga-contohnya/>,
 Diakses pada 5 November 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> (diakses pada tanggal 5 desember 2019).

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/> (diakses pada tanggal 22

desember 2019).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia